

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang hidup secara harmonis (*living in harmony*) dalam lingkungan yang aman, tertib, sehat, selaras dan lestari dengan menjunjung nilai-nilai budaya lokal. Pengembangan komunitas menuju tatanan masyarakat Madani merupakan upaya untuk membantu penghuninya bertanggung jawab membangun hubungan-hubungan dengan komunitas yang lebih luas dan bahkan dengan lingkungan permukiman mereka secara harmonis.

Tambak Lorok merupakan kawasan yang masuk dalam Perencanaan Berbasis Komunitas di Kota Semarang yang telah melalui berbagai proses, mulai proses persiapan hingga tahap perencanaan partisipatif. Rencana penataan lingkungan Kawasan Tambak Lorok secara makro atau menyeluruh berisi kawasan-kawasan yang diidentifikasi berdasarkan berbagai kriteria permasalahan dan potensi penataan dari kawasan-kawasan yang terdapat di Kawasan Tambak Lorok. Dalam kawasan tersebut dijadikan sebagai prioritas utama untuk dapat diintervensi secara fisik melalui kesepakatan masyarakat.

Proses perancangan elemen fisik pada pembangunan sarana lingkungan dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan berdasarkan kebutuhan masing-masing pihak tersebut sehingga muncul berbagai keragaman bentuk fisik. Untuk memperoleh kualitas lingkungan

yang sesuai dengan yang dikehendaki maka dilakukan pendekatan rancang bangun kawasan yang dalam lingkup tata kota dikenal sebagai rancang kota (*urban design*).

Dengan demikian, agar program dapat berjalan berdasarkan pada tujuan yang jelas, baik target maupun sasarannya, maka dapat disusun program pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang serta menentukan langkah-langkah pengendaliannya setelah melalui proses analisa atau penilaian dari segala aspek. Dalam penentuan target maupun sasaran yang tepat dari suatu pembangunan prasarana/sarana di suatu kawasan diperlukan data dan informasi berkaitan dengan program dan pelaksanaan pembangunan bidang permukiman di kawasan tersebut. Maka dari itu, perlu adanya arahan terhadap penataan lingkungan permukiman serta melakukan langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaannya yang tertuang dalam Rencana Penataan Lingkungan Permukiman di Kawasan Tambak Lorok, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

Kehadiran Penataan Kawasan Kampung nelayan di Tambak Lorok pada awalnya sudah masuk dalam Program *KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)* yang merupakan program pemerintah pusat dimana Pemerintah Kota masuk dalam salah satu kota yang terpilih dalam program tersebut. Sebagai Ibukota Jawa Tengah dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.175.092 juta jiwa, Kota Semarang memiliki luas kawasan kumuh 415,83 Ha yang tersebar di 62 kelurahan.

Program *KOTAKU* yang didalamnya terdapat program Kampung Bahari, memiliki tujuan untuk mensukseskan target 0 persen kawasan kumuh pada 2019, menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menangani permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, seperti akses air minum, belum tersedianya sanitasi yang layak serta sampah yang tidak didaur ulang. Pemerintah telah menyusun berbagai program, mulai dari Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPST 3R), hingga *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase* (NUSP Phase 2). (Prabowo, Dani. "Tiga Jokowi Berkuasa Penanganan Kawasan Kumuh belum maksimal". Kompas.com)

Kebijakan yang ideal tidak akan menjadi kebijakan yang baik apabila tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2014). Pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab mengatur, membina dan mengawasi serta mengendalikan penyelenggaraan di wilayahnya. Tujuan pengembanan kawasan adalah untuk membangun dan mengembangkan wilayah tersebut berdasarkan azas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.

Sekitar tahun 1950 pada kawasan ini muncul sebuah pemukiman yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Fenomena yang ada bahwa masyarakat yang bermukim di kawasan ini

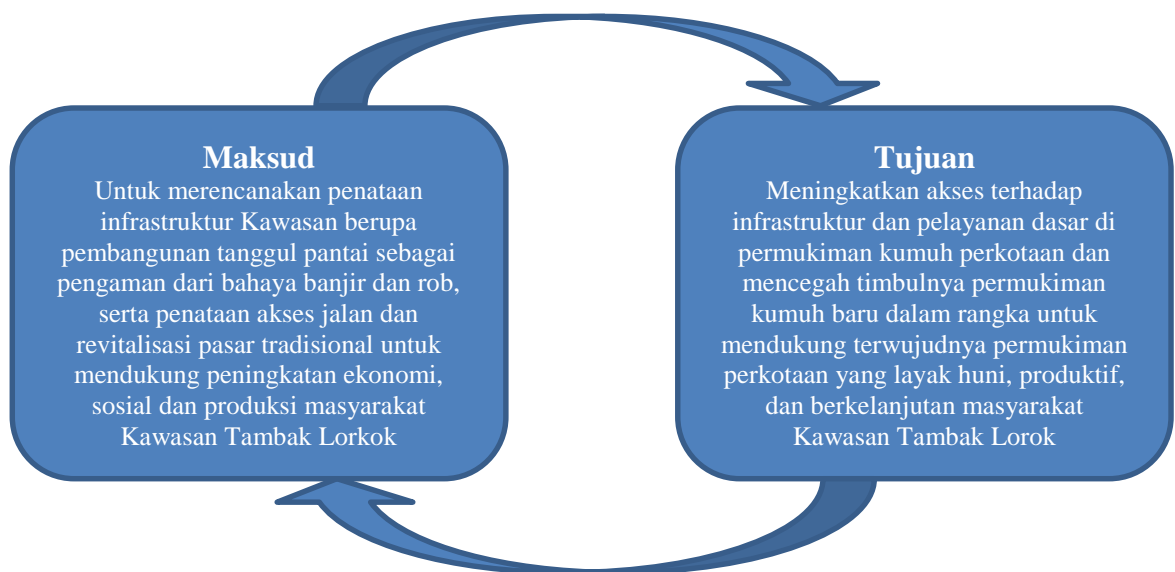
memiliki ketergantungan terhadap *Natural Resources* (sumber alam) yaitu laut sebagai tempat mencari ikan, sungai dan muara sebagai tempat menambat perahu dan keluar masuknya perahu ke laut. Oleh karena, fenomena ini telah menyatu dengan kehidupan kebudayaan masyarakat serta berlangsung turun menurun maka pemukiman ini lebih dikenal dengan pemukiman nelayan (Aziz, dkk, 2007).

Perubahan yang terjadi pada wilayah pesisir dan laut tidak hanya sekedar gejala alam semata, tetapi kondisi ini sangat besar dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang ada di sekitarnya. Wilayah pesisir merupakan wilayah pintu gerbang bagi berbagai aktivitas pembangunan manusia dan sekaligus menjadi pintu gerbang dari berbagai dampak dari aktivitas tersebut. Dengan kata lain wilayah pesisir merupakan wilayah yang pertama kali dan paling banyak menerima tekanan dibandingkan dengan wilayah lain. Tekanan tersebut muncul dari aktivitas pembangunan seperti pembangunan permukiman dan aktivitas perdagangan karena wilayah pesisir paling rentan terhadap perubahan baik secara alami ataupun fisik sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan.

Sebuah konsep perencanaan penataan kawasan, bangunan dan lingkungan di Kawasan Tambak lorok Kota Semarang dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap penurunan kualitas lingkungan yang terus menerus terjadi di Kawasan Tambak Lorok. Kampung Tambak Lorok merupakan bagian dari Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara. Memiliki luas \pm 84,48 ha, dengan wilayah Tambakmulyo di sebelah barat dan

Tambakrejo di sebelah Timur. Potensi utama adalah adanya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang didalamnya sekaligus terdapat TPI.

Guna mewujudkan rencana pengembangan kawasan baru di Kampung Bahari, maka diperlukan konsep dan perencanaan terkait prasarana dan utilitas lingkungan di kawasan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kawasan tersebut bebas dari pengaruh air laut pasang (rob) dan konsep pengendalian banjir kawasan terintegrasi dengan konsep penataan bangunan yang sinergi dengan penataan lingkungan di Kawasan Kampung Bahari dan Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Mas.



Gambar 1.1. Skema Maksud dan Tujuan Penelitian

Perencanaan kawasan kampung bahari mengandung pengertian bahwa kehidupan bermukim masyarakat di Kawasan Tambak Lorok harus mencirikan kelautan (maritim). Dua hal utama yang mendasari konsep perencanaan Kawasan Tambak Lorok yaitu morfologi yang membentuk kawasan dan faktor ekonomi. Morfologi kawasan saat ini terbentuk secara

tidak teratur, serta merupakan kawasan permukiman yang tumbuh tidak terencana. Sementara itu, dari aspek ekonomi mencirikan kawasan yang miskin, kotor dan kumuh (*slum area*). Oleh karena itu, dalam perencanaan kawasan konsep perencanaan kawasan ditekankan pada 3 (tiga) kata kunci yaitu: *Urban community*, permukiman unik dan *sea front landscaping scheme*.

Berdasarkan konsep pengembangan kampung bahari Tambak Lorok ada 6 zona pengembangan yaitu :

1. Zona Permukiman

Terdapat di kawasan Tambak Lorok bagian barat (wilayah Tambak Mulyo), dimana karakter perkampungan tetap dijaga dengan blok-blok massa yg berdekatan, karena ruang yg tercipta diantara bangunan merupakan ruang publik sekaligus ruang interaksi antar sesama penghuni.

2. Zona Permukiman Vertikal

Zona yang dikembangkan pada area reklamasi (*disposal area*) di sisi selatan. Pengembangan permukiman vertikal dilakukan dengan tetap mempertahankan suasana kampung yang dinamis dan fleksibel disesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat.

3. Zona Perdagangan dan Jasa

Dikembangkan pada aera di sepanjang koridor Jalan Tambak Mulyo. Pada kawasan ini dilakukan penataan dan peningkatan kualitas koridor kawasan, dimana pada kondisi eksisting kawasan ini memang telah berkembang sebagai kawasan perdagangan dan jasa.

4. Zona Wisata Bahari dan Kuliner

Dikembangkan di kawasan Tambak Rejo. Pada zona ini, kawasan permukiman didesain dengan karakter yang menginspirasi, seperti rumah panggung dan sebagai kawasan yang mencirikan kampung bahari dengan tetap bercorak waterfront house.

5. Zona Pelabuhan Rakyat dan Industri Maritim

Dikembangkan sebagai pusat aktivitas bahari, yaitu dengan adanya PPI (dan TPI) Tambaklorok dan pasar sebagai pusat distribusi hasil laut. Selain itu dikembangkan pula industri maritim untuk mendukung aktivitas kebaharian di kawasan Tambak Lorok.

6. Zona Konservasi

Merupakan zona konservasi mangrove yang dikembangkan di beberapa titik di kawasan perencanaan terutama di ujung timur area industri maritim atau di daerah dekat bekas TPI Tri Mulyo. Pengembangan zona konservasi mangrove bertujuan untuk mengantisipasi ancaman abrasi dan penurunan tanah di kawasan Tambak Lorok.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan implementasi Kampung Bahari di Kawasan Tambak Lorok, maka penelitian ini mengambil judul **“Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Implementasi Kampung Bahari”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Kawasan Tambak Lorok dalam RTRW Kota Semarang?
2. Bagaimana strategi pemerintah Kota Semarang terkait penataan dan pengembangan kawasan Tambak Lorok menjadi Kampung Bahari?
3. Bagaimana dampak Kawasan Kampung Bahari terhadap masyarakat Tambak Lorok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan Kawasan Tambaklorok dalam RTRW Kota Semarang
2. Untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Semarang terkait penataan dan pengembangan kawasan Tambak Lorok
3. Untuk mengetahui dampak Kawasan Kampung Bahari terhadap masyarakat Tambaklorok

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini sebagai salah satu kajian ilmu lingkungan dalam ilmu tata pemerintahan yang berkaitan dengan kebijakan

pembangunan wilayah khususnya kebijakan dalam Implementasi Kampung Bahari.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kota Semarang, dalam implementasi kampung bahari, serta sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kampung bahari.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk menghasilkan kajian yang lebih mendalam dan holistik, maka dilakukan pengkajian terhadap penelitian sebelumnya yang dianggap relevan. Sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya, diantaranya :

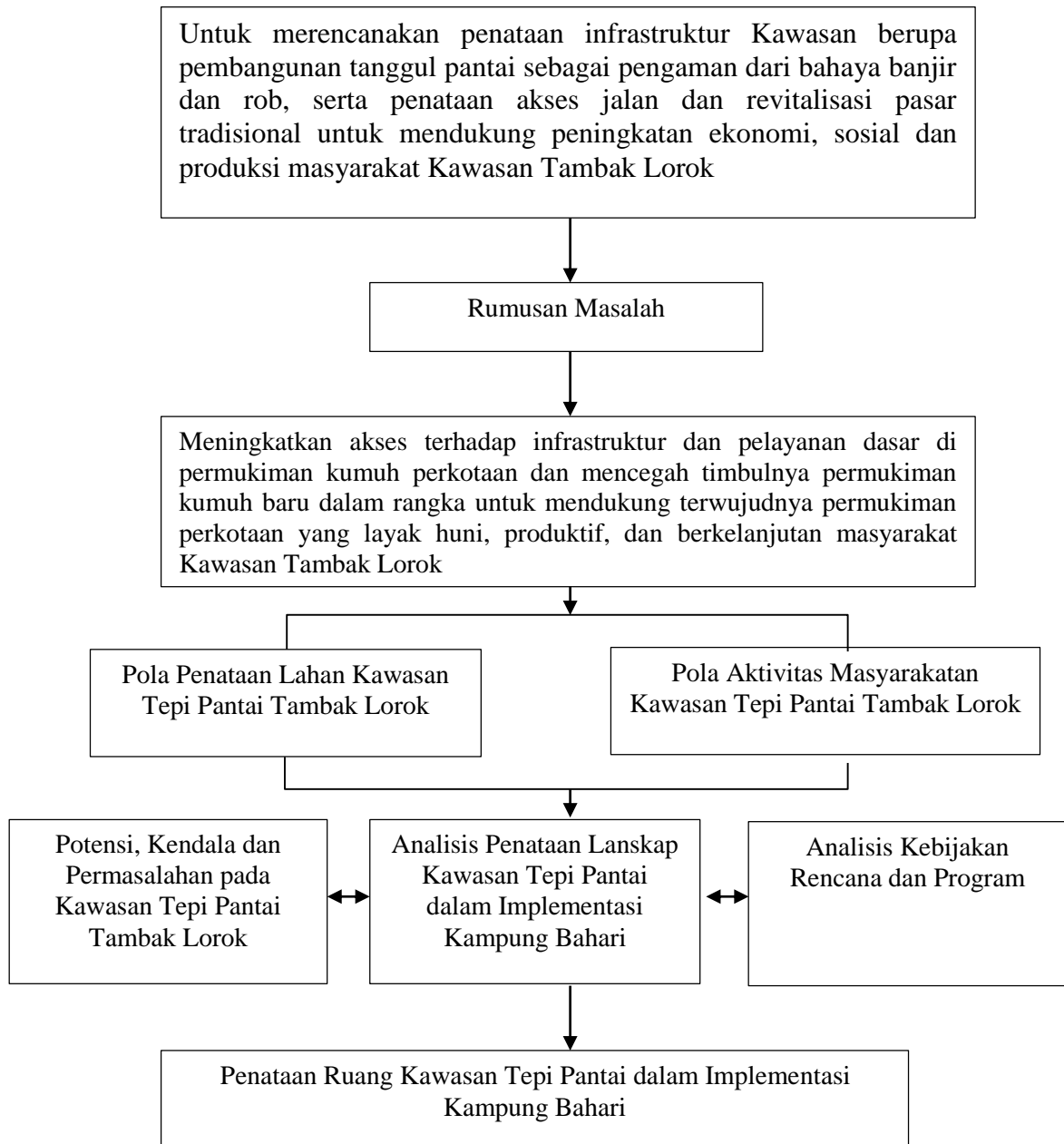
1. Purnamasari (2011) Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata Di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan produk wisata yang ditawarkan, maka arahan yang paling tepat adalah mengangkat karakter asli Kampung Toddabojo dalam strategi pengembangan produk wisatanya, dan kemudian disusun kerangka pengembangannya berdasarkan produk wisatanya, sehingga kegiatan pariwisata di Kampung Toddabojo dapat menjadi bentuk pariwisata yang berkelanjutan.
2. Zamzami (2016) Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Melestarikan Wisata Bahari. Pengembangan masyarakat nelayan melalui penguatan pranata sosial perikanan

merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama nelayan untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan nelayan akan disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Dengan partisipasi yang tinggi terhadap kelembagaan nelayan, diharapkan rasa ikut memiliki dari masyarakat atas semua kegiatan yang dilaksanakan akan juga tinggi. Keberhasilan penerapan suatu pranata sosial nelayan tidak semata-mata diukur dengan nilai tambah ekonomi, namun harus mempertimbangkan peran dan fungsi nilai-nilai sosio-kultural secara utuh.

3. Berkahti, (2015) Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Selatbaru Kabupaten Bengkalis. Masalah-masalah yang dianggap kecil dalam birokrasi pemerintah kerap kali disepelekan dan hal ini membuat pengembangan wisata bahari di pantai Selatbaru kurang berkembang. strategi pengembangan pantai Selatbaru dari berbagai indikator harus adanya kerjasama antara pengelola kebijaksanaan (stakeholder) dan pelaksana kebijakan serta pengawas kebijakan agar mencapai tujuan yang diharapkan.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2. Kerangka Berpikir